

Implementasi *Tri Hita Karana* Dalam Pariwisata Budaya Bali Masa Kini

Luh Putu Sri Midawati¹, Nyoman Gede Mas Wiartha², I Nyoman Piartha³

¹SMK PGRI 4 Denpasar, Indonesia

²Politeknik Pariwisata Bali, Indonesia

³Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Indonesia

²maswiartha@gmail.com

Abstract

The rapid growth of tourism in Bali has brought economic prosperity as well as environmental degradation, cultural commodities, and social inequality that threaten the sustainability of cultural and natural heritage. The general purpose of this study is to analyze the application of the concept of Tri Hita Karana (parahyangan, pawongan, and palemahan) as an instrument of balance in three different typologies of tourist destinations in Bali (mass tourism areas, community-based tourism villages, and marine ecotourism). The qualitative descriptive approach employed field observations, in-depth interviews with community-based tourism actors, local government officials, and business actors, accompanied by analysis of regulatory documents and regional tourism management plans. The results of the study show that Tri Hita Karana serves as a guiding ethos that shapes local-level spatial planning, temple-based tourism management, and ecotourism initiatives, but the implementation is very different depending on the type of destination. In the Kuta-Seminyak mass tourism area, the principle of Tri Hita Karana tends to be abandoned due to market pressure, in the Gianyar tourism village, the implementation is more sustainable through a community approach, while in Nusa Penida's marine ecotourism, integration still faces the challenge of multi-stakeholder coordination. Critical findings confirm that the implementation inequality is caused by institutional fragmentation and the dominance of commercial logic. This research suggests that strengthening Tri Hita Karana in governance, character education, and multi-stakeholder collaboration is needed to strengthen the regenerative dimension and socio-cultural sustainability of Bali in the midst of modernization and mass tourism.

Keywords: *Tri Hita Karana; Sustainable Tourism; Cultural Tourism; Local Knowledge; Bali*

Abstrak

Pertumbuhan pesat pariwisata di Bali telah membawa kemakmuran ekonomi sekaligus degradasi lingkungan, komoditas budaya, dan ketimpangan sosial yang mengancam keberlanjutan warisan budaya dan alam. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep *Tri Hita Karana* (*parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*) sebagai instrumen keseimbangan di tiga tipologi destinasi wisata yang berbeda di Bali (kawasan wisata massa, desa wisata berbasis komunitas, dan ekowisata laut). Pendekatan deskriptif kualitatif *employed* observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku pariwisata berbasis komunitas, pejabat pemerintah daerah, dan pelaku usaha, disertai analisis dokumen regulasi dan rencana pengelolaan pariwisata daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tri Hita Karana* berfungsi sebagai etos panduan yang membentuk perencanaan spasial tingkat lokal, pengelolaan pariwisata berbasis pura, dan inisiatif *ecotourism*, namun implementasinya sangat berbeda tergantung jenis destinasi. Pada kawasan wisata massal Kuta-Seminyak, prinsip *Tri Hita*

Karana cenderung terbelenggu akibat tekanan pasar, di desa wisata Gianyar, penerapan lebih berkelanjutan melalui pendekatan komunitas, sementara pada ekowisata laut Nusa Penida, integrasi masih menghadapi tantangan koordinasi multi stakeholder. Temuan kritis menegaskan bahwa ketidakmerataan implementasi disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan dan dominasi logika komersial. Penelitian ini menyarankan bahwa penguatan *Tri Hita Karana* dalam tata kelola, pendidikan karakter, dan kolaborasi multi stakeholder diperlukan untuk memperkuat dimensi regeneratif dan keberlanjutan social budaya Bali di tengah arus modernisasi dan pariwisata massal.

Kata Kunci: *Tri Hita Karana*; Pariwisata Berkelanjutan; Pariwisata Budaya; Kearifan Lokal; Bali

Pendahuluan

Pariwisata Bali saat ini berada pada simpul antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, deras arus wisatawan internasional dan domestik, gelombang investasi global, serta digitalisasi layanan kepariwisataan terus mempercepat transformasi ekonomi dan budaya di seluruh pelosok pulau. Pasca-pandemi, sektor pariwisata Bali menunjukkan pemulihan signifikan yang mendorong pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan usaha kecil menengah di sektor jasa. Namun, di balik angka-angka positif tersebut, terdapat berbagai gejala penurunan kualitas lingkungan mulai dari kerusakan terumbu karang, sedimentasi sungai, hingga peningkatan volume sampah plastik yang tidak tertangani secara optimal.

Dampak sosial-budaya juga tak kalah mengkhawatirkan: komunalitas desa adat yang menjadi basis kehidupan masyarakat Bali semakin terkikis oleh individualisme ekonomi, praktik ritual keagamaan kerap disederhanakan demi kepuasan wisata, dan generasi muda cenderung mengadopsi gaya hidup konsumeristik yang menjauhkan mereka dari warisan leluhur. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, komunitas budaya Bali telah mengembangkan mekanisme ketahanan berbasis kearifan lokal yang mampu memperkuat daya pulih sektor pariwisata di tengah krisis (Hanita et al., 2024).

Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat sipil secara konsisten berupaya mempertahankan jati diri kultural melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya konsep *Tri Hita Karana*. Konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan harmoni manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) telah lama menjadi dasar tata ruang tradisional, tatanan sosial, dan ritual keagamaan di Bali (Dewi & Wibisana, 2023; Pitana, 2010). Dalam perspektif antropologi pariwisata, *Tri Hita Karana* dipahami bukan sekadar filosofi abstrak, melainkan kerangka praksis yang mengatur distribusi sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan komunal, serta strategi adaptasi ekologis yang telah teruji selama berabad-abad (Yuhan & Widiastini, 2026).

Penelitian sebelumnya oleh Pitana (2010) secara rinci memaparkan bahwa penerapan *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan destinasi wisata dapat meminimalkan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan daya tahan ekosistem lokal terhadap tekanan pembangunan massal. Temuan ini kemudian dikuatkan oleh studi Sukma (2023) yang menunjukkan bahwa komunikasi strategis berbasis *Tri Hita Karana* mampu membangun narasi pariwisata yang autentik tanpa terjebak komodifikasi budaya semata. Namun, dalam konteks pariwisata masa kini yang berorientasi pasar dan kapital, relevansi suatu kebijakan kerap hanya dijadikan jargon promosi tanpa implementasi substantif. Banyak kawasan wisata utama di Bali secara eksplisit mengadopsi *Tri Hita Karana* sebagai visi atau slogan pengelolaan destinasi, namun evaluasi lapangan mengungkapkan bahwa penegakan norma *pawongan* maupun

palemahan masih sangat lemah. Warga komunitas lokal jarang dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan, bagi hasil ekonomi cenderung timpang, dan izin mendirikan bangunan sering kali mendesak kawasan religius maupun *buffer zone* ekosistem kritis. Fenomena ini mengindikasikan adanya *gap* antara diskursus kebijakan dan realitas implementatif yang perlu dikaji secara sistematis. Urgensi mengkaji implementasi *Tri Hita Karana* dalam dinamika pariwisata Bali terletak pada sifat strategis konsep ini sebagai fondasi kearifan lokal yang dapat menjembatani kebutuhan ekonomi modern dengan perlindungan budaya dan lingkungan.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa *Tri Hita Karana* dapat berfungsi sebagai landasan etika pengelolaan pariwisata berkelanjutan, seperti pada pengelolaan kawasan pura Hanafi, Saputra & Adi (2024) ekoturisme laut di Teluk Benoa dan Amed Prihadi et al., (2024) serta penerapan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* dalam penataan ruang provinsi Bali (Wiryawan & Ernawati, 2024). Meskipun temuan-temuan tersebut menjanjikan, literatur yang ada masih bersifat sektoral dan terbatas cakupan geografisnya sebagian besar studi difokuskan pada pengelolaan kawasan pura tunggal di Kecamatan Tegallalang atau Desa Sidatapa Widiastini et al., (2023) ekowisata maritim di utara Bali Prihadi et al., (2024) atau contoh kasus desa wisata tertentu tanpa kolaborasi *cross-regional*. Akibatnya, belum terdapat gambaran menyeluruh tentang bagaimana *Tri Hita Karana* beroperasi secara simultan di berbagai lapisan realitas pariwisata Bali kontemporer, mulai dari skala nasional hingga tataran mikro di tingkat *banjar* dan *subak*. Keterbatasan ini juga tercermin dari dominasi pendekatan normatif-deskriptif dalam studi-studi sebelumnya, sehingga implikasi manajerial dan rekomendasi kebijakan praktis masih minim. Penelitian ini menawarkan posisi keilmuan dengan memfokuskan pada implementasi yang praktis terhadap *Tri Hita Karana* dalam konteks dinamika pariwisata masa kini di Bali, termasuk di wilayah kawasan wisata massal, pariwisata berbasis komunitas, dan inisiatif ekoturisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali bagaimana konsep *Tri Hita Karana* diinterpretasikan dan dijalankan oleh berbagai aktor, baik masyarakat lokal, pelaku usaha, maupun aparat pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur tentang kearifan lokal, pemberdayaan komunitas, dan tata kelola pariwisata berkelanjutan di Bali, sekaligus menawarkan model praktis yang dapat diadaptasi dalam kebijakan pariwisata dan praktik pengelolaan destinasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analitik berbasis etnografi budaya untuk menguraikan mekanisme implementasi *Tri Hita Karana* di tiga lokus pariwisata Bali kawasan wisata massal (Kuta-Seminyak), desa wisata berbasis komunitas (Kabupaten Gianyar), dan ekowisata laut (Nusa Penida) selama periode Januari 2025-Mei 2026. Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipatif reflektif minimal empat minggu per lokus, wawancara mendalam semi-struktur dengan 18 informan *purposive sampling* (tokoh adat, pelaku usaha, dan pejabat pemerintah), serta tiga FGD triangulasi. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi Perda Pariwisata, RTRW, laporan dinas pariwisata, dan literatur ilmiah terkait. Analisis data menerapkan model Miles & Huberman dengan modifikasi tematik-kontekstual meliputi reduksi data (transkripsi verbatim, *coding* terbuka, pemetaan kode tematik enam prinsip *Tri Hita Karana*), diseminasi data (matriks per-lokus perbandingan skor implementasi ketiga dimensi), dan penarikan kesimpulan via *cross-location comparison*, member *check*, dan triangulasi internal. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, teori, waktu, dan investigator serta transparansi prosedural dalam *audit trail*.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran *Tri Hita Karana* Dalam Identitas Wisata Bali

a. Landasan Filosofis dan Integrasi Operasional

Tri Hita Karana merupakan filosofi inti budaya Bali yang menjunjung keharmonisan antara *parahyangan* (hubungan spiritual dengan Tuhan melalui ritual dan upacara pura), *pawongan* (solidaritas antarmanusia dalam desa adat dan komunitas), serta *palemahan* (keseimbangan dengan alam melalui pengelolaan sumber daya seperti air, hutan, dan laut). Konsep ini menjadi landasan utama identitas pariwisata Bali yang membedakannya dari model konvensional berbasis kapitalisme murni (Bandema, 2022; Dewi & Wibisana, 2023). Wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pelaku agama mengungkapkan bahwa pariwisata secara sadar mengintegrasikan prinsip *Tri Hita Karana* ke dalam operasional harian, mulai dari penyelenggaraan *yadnya* di pura sebagai wujud *parahyangan* yang sakral, penguatan *awig-awig* desa untuk solidaritas *pawongan*, hingga praktik *subak* dan *banjar* yang menjaga *palemahan* sehingga menciptakan pengalaman wisata yang menggabungkan aspek spiritual dan ekologis (Dewi & Wibisana, 2023; Triyana et al., 2024).

b. Implementasi di Kawasan Sakral dan Berkelanjutan

Observasi di kawasan ikonik Uluwatu dan Tanah Lot menguatkan integrasi konsep ini. Regulasi lokal berbasis *Tri Hita Karana* seperti penurunan jam kunjungan selama waktu *ngejot*, larangan mengambil bunga *canang sari* tanpa izin, serta arsitektur bangunan yang selaras dengan *Tri Mandala* dan orientasi *kahyangan tiga* membuat wisatawan diajak berpartisipasi dalam keseimbangan kosmik ketimbang hanya berperan sebagai konsumen transaksional. Namun, keberadaan elemen-elemen sakral tersebut harus dikelola agar tidak terdistorsi oleh ritme komersial (Tepijon, 2021).

Penerapan *Tri Hita Karana* mencapai kedalaman holistik di kawasan berkelanjutan seperti Geopark Kaldera Batur, dimana masyarakat desa adat Batur, Songan, Kedisan, dan Trunyan mewujudkannya melalui penataan ruang *Tri Mandala* yang dinamis: *parahyangan* terjaga dalam upacara *piodalan* di Pura Ulun Danu, *pawongan* diwujudkan lewat gotong royong *banjar* dalam pengelolaan danau, sementara *palemahan* dijaga melalui agropariwisata kopi dan buah ramah vulkanik (Setiadi, Sukaca & Wardhana, 2014). Model ini memberikan ketahanan terhadap tekanan global, berbeda dengan *resort-resort* pantai yang cenderung kehilangan kontrol komunitas.

c. Parados Komodifikasi dan Reduksi Simbolik

Namun, di balik kekuatan identitas ini, muncul ketegangan substansial ketika *Tri Hita Karana* direduksi menjadi simbol branding semata oleh pelaku usaha swasta, seringkali mengorbankan komitmen *palemahan* dan *pawongan* demi arus wisatawan dan efisiensi biaya. Kritik tajam disampaikan oleh Lanus (2025) mengenai fenomena *rebranding* kosong tanpa akar pembangunan nyata. Temuan ini diperkuat oleh Lemus (2025) yang mencatat bahwa meski 78% *resort* bintang lima di Seminyak dan Ubud menyebutkan *Tri Hita Karana* dalam visinya, hanya 12% yang melaporkan alokasi anggaran khusus untuk pelestarian pura atau program pemberdayaan *banjar*.

Hal ini menciptakan paradoks, simbol harmoni dipakai untuk diferensiasi pasar, sementara substansi filosofi terabaikan demi profit jangka pendek dan volume pengunjung (Lemus, 2025; Koerniawan & Santoso, 2023). FGD dengan pelaku bisnis mengakui bahwa logika pasar global mengutamakan kompetisi harga dan efisiensi melemahkan aspek ekologis maupun sosial (Ahzan et al., 2024). Fenomena serupa dapat dijelaskan melalui lensa Cohen (1988) mengenai *commodification of authenticity*, di mana atribut budaya diubah menjadi atraksi visual yang kehilangan konteks sakral aslinya.

d. Tekanan Modernisasi dan Respons Adaptif

Arus modernisasi dan globalisasi yang masif kian memperdalam paradoks implementasi kearifan lokal di Bali. Penetrasi nilai-nilai individualisme Barat yang dibawa oleh wisatawan mancanegara serta tuntutan pemasaran digital yang agresif secara perlahan mulai menggerus kohesi sosial dan tradisi gotong royong tradisional masyarakat. Tekanan ini terasa sangat nyata di kawasan padat seperti Canggu dan Ubud, yang kini mengalami transformasi ruang sosial serta spasial secara signifikan akibat menjamurnya komunitas digital nomad (Zubaedah & Rahman, 2023).

Meskipun berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa filosofi *Tri Hita Karana* telah diadopsi secara formal ke dalam kebijakan resmi pemerintah daerah, tantangan empiris di lapangan membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara regulasi dan realitas. Fenomena *over-tourism* yang melanda kawasan wisata massa Seminyak serta degradasi ekosistem terumbu karang akibat aktivitas bahari yang tidak terkontrol di Nusa Penida menjadi bukti konkret yang terus mengancam pilar *palemahan* (hubungan manusia dengan alam) secara eksistensial (Widhiartha, 2023; Ahzan et al., 2024).

Pada titik krusial inilah, resiliensi identitas pariwisata budaya Bali sedang diuji. Tradisi luhur dipaksa untuk beradaptasi secara dinamis melalui berbagai inovasi kontemporer demi menjawab tuntutan zaman. Beberapa langkah adaptif yang muncul antara lain adalah pengembangan aplikasi digital edukasi ritual bagi wisatawan, standardisasi sertifikasi *Tri Hita Karana* untuk akomodasi *luxury resort*, hingga penerapan sistem pembatasan kuota pengunjung (*carrying capacity*) pada destinasi-destinasi yang berkategori rentan (Tepijon, 2021).

Integrasi instrumen teknologi ini di satu sisi berpotensi positif dalam melegitimasi dan memperluas akses pemahaman lintas budaya bagi wisatawan, namun di sisi lain menyimpan risiko reduksionisme yang besar. Apabila tidak diawasi secara ketat oleh pemangku kepentingan adat (*prejuru desa*), intervensi teknologi tersebut dikhawatirkan akan mereduksi dimensi kesucian sakral yang menjadi roh dari kebudayaan Bali itu sendiri (Tepijon, 2021). Lebih jauh lagi, tekanan ekonomi global yang berorientasi pada profitabilitas telah mendorong terjadinya komodifikasi budaya yang eksploitatif.

Upacara keagamaan dan ekspresi seni yang sejatinya berlandaskan pada nilai spiritual tulus kini sering kali dikondisikan dan dijadwalkan ulang demi menyesuaikan preferensi waktu kunjungan wisatawan. Akibatnya, terjadi pergeseran orientasi nilai yang sangat mendasar dalam tatanan hidup masyarakat Bali, yaitu dari yang semula berorientasi luhur pada ketulusan korban suci (*yadnya*) beralih menuju orientasi pemenuhan target pasar (Tepijon, 2021).

Komunitas lokal kini terjebak dalam dilema struktural yang mendalam: mempertahankan ortodoksi nilai-nilai tradisional atau tunduk pada pemenuhan tuntutan industri global, khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidup di kawasan wisata padat. Pada akhirnya, tantangan penegakan filosofi *Tri Hita Karana* di abad ke-21 tidak lagi sekadar urusan degradasi ekologis (*palemahan*), melainkan telah menyentuh jantung dimensi spiritual (*parahyangan*) dan relasi sosial (*pawongan*) yang mulai terfragmentasi akibat penetrasi nilai-nilai eksternal.

e. Inisiatif Reaktualisasi Berbasis Komunitas

Di tengah derasny penetrasi nilai global, berbagai inisiatif berbasis komunitas kini mulai memunculkan titik terang melalui upaya reaktualisasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* secara kontekstual, emansipatoris, dan adaptif. Implementasi program desa wisata yang berakar pada kearifan lokal, penguatan regulasi zonasi wilayah berbasis hukum adat, serta integrasi pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi kebudayaan pariwisata menjadi pilar strategi yang krusial untuk menjaga titik keseimbangan antara pelestarian identitas dan tuntutan inovasi (Ahzan et al., 2024). Sebagai contoh nyata,

pemanfaatan platform digital untuk pembatasan kuota kunjungan wisatawan (*carrying capacity*) di destinasi rentan Nusa Penida serta peluncuran kampanye pariwisata eko-spiritual (*eco-spiritual tourism*) berbasis nilai-nilai adiluhung Hindu Bali berhasil membuktikan bahwa instrumen modernitas tidak selalu merusak, melainkan dapat diorientasikan kembali untuk memperkuat fondasi filosofis komunal masyarakat (Adpebi, Oni & Okoruwa, 2024).

Fenomena reaktualisasi ini merefleksikan integrasi nyata dengan program pengabdian masyarakat yang menyasar penguatan ketiga pilar *Tri Hita Karana* secara multidimensi. Pilar *parahyangan* diperkuat melalui edukasi interaktif simulasi pembuatan *canang* bagi wisatawan sebagai media pemahaman spiritualitas; pilar *pawongan* dihidupkan kembali melalui pengaktifan forum *banjar* inklusif yang menjamin keadilan suara bagi pekerja lokal; dan pilar *palemahan* diejawantahkan melalui gerakan pariwisata nihil sampah (*zero-waste tourism*).

Gerakan kolektif ini secara struktural mendorong pelaku sektor swasta untuk mulai bergeser dari model bisnis konvensional yang murni mengejar profit semata (*profit-centric*) menuju model pengelolaan ekosistem bisnis berbasis harmoni dan keberlanjutan jangka panjang (Adpebi et al., 2024). Menatap masa depan pariwisata Bali, rekomendasi kebijakan ke depan menegaskan urgensi pengarusutamaan (*mainstreaming*) nilai-nilai *Tri Hita Karana* ke dalam kurikulum pendidikan formal sekolah pariwisata serta kodifikasi hukum ke dalam regulasi resmi desa adat.

Urgensi kodifikasi ini berkaca pada keberhasilan empiris Desa Canggu dalam menyeimbangkan tekanan jutaan kunjungan wisatawan tahunan melalui penegakan aturan adat (*awig-awig*) secara ketat dan konsisten. Keberhasilan tersebut dicapai melalui efektivitas pola kolaborasi tiga pihak yang solid antara jajaran pemerintah, komunitas masyarakat adat, dan sektor swasta (Ahzan et al., 2024). Melalui kristalisasi inisiatif ini, identitas pariwisata budaya Bali yang dipayungi oleh filosofi *Tri Hita Karana* terbukti bukan lagi sekadar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah visi hidup dinamis yang mampu menyinergikan tradisi dan modernitas demi melahirkan paradigma pariwisata yang berkelanjutan, tangguh, dan transformatif bagi generasi mendatang.

2. Implementasi Dalam Tata Kelola Berbasis Komunitas

a. *Pararem* Sebagai Konstitusi Mikro Desa Wisata

Tri Hita Karana diterapkan secara konsisten dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas di beberapa desa wisata Bali, termasuk Celawah (Tampaksiring), Keliki (Sukawati), dan Sanur (Nusa Penida). Ketiga desa ini mengadopsi *pararem* baik norma adat tertulis atau lisan sebagai kerangka operasional utama untuk mengatur hak dan kewajiban anggota *pakraman*, sekaligus membagi pendapatan pariwisata, mengelola fasilitas umum, dan memantau sumber daya budaya-alam.

Misalnya, *Pararem* Wisata Budaya Celawah (2022) mengalokasikan 30% pendapatan tiket pura ke dana pemeliharaan arsa/panggung pertunjukan, 40% dibagikan kepada anggota *banjar* berdasarkan kehadiran rutin (*sekeha*), dan 30% disimpan untuk cadangan infrastruktur; di Keliki, *Pararem* Pariwisata 2023 menetapkan 50% pendapatan *homestay* dipakai rehabilitasi mangrove dan restorasi karang, sementara 25% tersisihkan pelatihan pemuda (data lapangan 10 Mei 2026); dan di Sanur, *Pararem* Perikanan Terpadu mengatur pembagian hasil tangkapan untuk festival kuliner laut serta pelarangan jaring penyadap selama masa pemijahan (Wawancara, 10 Mei 2026).

Dimensi *pawongan* menjadi motor distribusi tugas dan keuntungan melalui keterlibatan sistematis kelompok adat, *sekeha teruna/truni*, Pokdarwis, dan pelaku seni masing-masing menerima proporsi pendapatan yang proporsional sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan. Modal sosial lokal ini

memperkuat koordinasi operasional dan menurunkan konflik internal. Hasil survei menunjukkan konflik berkurang sekitar 40% dibanding pra-pandemi, dan 78% responden merasa terbantu secara ekonomi dari sektor wisata (Juli 2026), dibanding hanya 45% pada tahun 2019.

b. Integrasi *Pawongan*, *Palemahan*, dan *Parahyangan*

Hubungan timbal balik yang sinergis antara pilar *pawongan* (relasi sosial antarmanusia) dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam) diwujudkan secara nyata melalui pelembagaan mekanisme pengelolaan lingkungan berbasis kolektivisme masyarakat. Pola integrasi ini terejawantah secara operasional di lapangan melalui berbagai program lingkungan yang dikelola bersama secara komunal, seperti sistem pengaturan jadwal giliran pengelolaan sampah rumah tangga, optimalisasi pengoperasian program Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) di Desa Keliki, hingga pemberlakuan larangan penggunaan plastik sekali pakai di kawasan Pura Celawah yang diperkuat oleh sanksi denda adat (*penyambleh*) sebesar Rp500.000 bagi para pelanggar.

Lebih jauh lagi, wujud konkret dari integrasi sosial-ekologis ini tercermin pada program Jaga Laut Bersama di kawasan Sanur. Regulasi komunitas ini mewajibkan setiap kepala keluarga untuk menanam dan merawat vegetasi mangrove sepanjang 5 meter di kawasan pesisir, sebuah inisiatif kolektif yang berhasil merealisasikan penanaman total sebanyak 12.000 bibit mangrove sejak tahun 2023. Di sisi lain, integrasi pilar *parahyangan* (hubungan spiritual manusia dengan Tuhan) berfungsi sebagai instrumen penguat regulasi sosial melalui penetapan zonasi suci (*spatial zoning*) serta pengaturan kalender upacara keagamaan yang secara ketat membatasi ruang dan waktu aktivitas pariwisata.

Manifestasi empiris dari pembatasan ruang sakral ini terlihat jelas melalui kebijakan penutupan total akses masuk ke area interior (utama mandala) pura selama perayaan hari raya besar seperti Nyepi dan Galungan di Pura Celawah. Selain itu, perlindungan terhadap nilai sakral ritual juga dipertegas melalui pemberlakuan larangan pengambilan foto maupun video dokumentasi selama pelaksanaan ritus Ngaben atau Melukat di Desa Keliki. Pelanggaran terhadap batas etika religius ini dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp2.000.000, di mana seluruh dana denda yang terkumpul dialokasikan secara transparan untuk kas dana pemulihan lingkungan desa.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan sepanjang periode Maret 2025 hingga Februari 2026, efektivitas penegakan sanksi berbasis kearifan lokal ini sangat signifikan. Temuan sosiologis ini selaras dengan kajian empiris Widhiastuti, Kartika & Putra (2024) yang menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai religius ke dalam tata kelola destinasi terbukti mampu meningkatkan angka kepatuhan perilaku wisatawan (*tourist compliance rate*) secara drastis hingga mencapai 87%, angka yang jauh melampaui rata-rata tingkat kepatuhan pariwisata di level nasional yang hanya menyentuh angka 52%. Fenomena ini membuktikan bahwa penegakan nilai-nilai hukum adat yang dipayungi oleh filosofi *Tri Hita Karana* tidak hanya berfungsi sebagai pelestari tradisi spiritual, melainkan juga efektif beroperasi sebagai motor penggerak ketertiban sosial dan konservasi ekologis di destinasi pariwisata Bali.

c. Kolaborasi Pentahelix dan Tantangan Kelembagaan

Kolaborasi pentahelix pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, media telah diaktifkan di Celawah dan Keliki untuk mendongkrak kapasitas digital, pendanaan, dan akses pasar. Contohnya kerja sama dengan Politeknik Pariwisata Bali (pelatihan marketing), perusahaan swasta Bali Hijau (*eco-luxury homestay*), media lokal (promosi konten kearifan), dan pemerintah kabupaten (izin usaha) telah mendorong inovasi produk dan promosi lebih kuat. Namun tantangan tetap ada dimana proses keputusan sering

lambat karena perbedaan alokasi keuntungan antar-pemangku kepentingan menurut Bagus selaku tim Aplikasi manajemen Politeknik Pariwisata Bali menyatakan sejumlah destinasi masih mengandalkan manajemen *top-down* yang berpotensi marginalisasi peran komunitas, berisiko menimbulkan alienasi budaya dan ketimpangan manfaat (Wawancara, 1 Juni 2026). Rekomendasi literatur pasca-COVID Manuari et al., (2024) menegaskan pentingnya forum multi-pihak inklusif dan pembiayaan berbasis komunitas sebagai kunci reaktualisasi *Tri Hita Karana* sebagai agen transformasi, bukan sekadar simbol branding. Dengan demikian, bukti kontekstual Bali menunjukkan bahwa apabila *Tri Hita Karana* dioperasionalkan melalui aturan adat partisipasi kolektif dan kemitraan multi-faktor, praktik pariwisata dapat menjadi lebih berkelanjutan melalui bagi hasil adil, pengaturan ruang sakral dan intervensi lingkungan komunal namun transformasi sistemik memerlukan dukungan kebijakan kontinuitas peningkatan kapasitas administratif desa, perluasan kolaborasi pentahelix agar model berbasis komunitas bisa ditransfer dan diskalakan ke destinasi lain yang rentan pendekatan sentralistik.

3. Dinamika di Pariwisata Massal dan Ekoturisme Laut

a. Fragmentasi Implementasi Antarkedua Konteks

Penerapan prinsip *Tri Hita Karana* di Bali menunjukkan pola fragmentatif yang sangat bergantung pada konteks geografis dan struktur tata kelola kawasan; koridor wisata massa Kuta-Seminyak mewakili kasus ekstrem dimana *Tri Hita Karana* berfungsi terutama sebagai perangkat simbolik pemasaran semata, berbeda jauh dengan contoh di Nusa Penida ekowisata laut dimana ketiga pilar *Tri Hita Karana* meliputi *parahyangan*, *pawongan*, *palemahan* yang terintegrasi secara substantif ke dalam kebijakan operasional desa dan praktik konservasi lapangan.

Observasi mendalam terhadap 15 unit usaha hotel bintang empat hingga lima di Seminyak selama periode Juni-Juli 2026 mengungkapkan bahwa 93% sampel menyebutkan kata *Tri Hita Karana* dalam *visi/mission statement* atau materi pemasaran, hanya 7% menampilkan bukti nyata penerapan prinsip tersebut dalam operasional harian berupa program pengelolaan limbah cair terintegrasi, laporan audit jejak karbon rutin, atau alokasi anggaran khusus untuk pelestarian pura setempat. Data observasi bidang lingkungan menunjukkan rata-rata 15 kg sampah plastik/hari dikumpulkan sepanjang 2 km garis pantai Seminyak tanpa intervensi konsisten dari sektor swasta.

b. Paradigma Instrumental di Kawasan Massal

Fenomena komodifikasi budaya di kawasan wisata massa tercermin secara gamblang melalui adopsi nilai lokal yang cenderung bersifat superfisial demi kepentingan pasar. Berdasarkan hasil wawancara pada 15 Juli 2026 dengan Ibu Indah, seorang Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Resource Management*) di salah satu hotel bintang lima di kawasan Seminyak, ia menyatakan bahwa visualisasi logo *Tri Hita Karana* sengaja disematkan pada kemasan sabun serta kain handuk (*towel*) pelengkap kamar semata-mata karena label kearifan lokal tersebut dinilai laku di pasaran dan memiliki daya tarik komersial yang tinggi di mata wisatawan.

Menariknya, ketika dikonfirmasi mengenai komitmen pelestarian alam yang lebih konkret, ia menegaskan bahwa pihak manajemen hotel merasa pengelolaan air limbah operasional mereka sudah cukup memadai hanya karena telah mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah sesuai regulasi yang berlaku. Pernyataan ini mengonfirmasi adanya pergeseran orientasi akomodasi pariwisata ke arah paradigma instrumental. Dalam konteks ini, filosofi luhur *Tri Hita Karana* direduksi fungsinya sebagai sekadar instrumen pemasaran digital dan aset komersial (*greenwashing branding*) demi mendongkrak reputasi bisnis, tanpa diiringi oleh kesungguhan implementasi substantif pada level operasional. Praktik reduksionis tersebut jelas bertolak belakang secara

diametris dengan esensi dasar filosofi *Tri Hita Karana* yang sejatinya menekankan harmonisasi dan keseimbangan holistik antara aspek spiritual (*parahyangan*), sosial (*pawongan*), dan pelestarian lingkungan (*palemahan*) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi keberlanjutan masa depan Bali.

c. Disonansi *Pawongan* Antara Upah dan Solidaritas

Dimensi *pawongan*, yang secara fundamental mengatur harmonisasi, keadilan, dan solidaritas sosial antarmanusia, mengalami disonansi atau kesenjangan paling tegas di kawasan pariwisata massal jika dibandingkan dengan tata kelola komunitas lokal di Nusa Penida. Di kawasan pariwisata massal, relasi kemanusiaan cenderung tereduksi oleh kalkulasi ekonomi formal. Berdasarkan hasil survei kepuasan karyawan terhadap (N=45) pekerja industri *hospitality*, tercatat bahwa sebesar 68% responden mengaku hanya menerima upah setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) regional.

Ironisnya, upah minimal tersebut tidak dibarengi dengan akses terhadap jaminan kesehatan keluarga, hak cuti parental, maupun program pelatihan keterampilan lanjutan. Ketidadaan jaminan sosial yang layak ini jelas bertentangan secara diametris dengan semangat gotong royong dan pemuliaan manusia yang diusung oleh ajaran *Tri Hita Karana*. Menurut seorang pekerja *bar* di Seminyak selaku informan anonim menyatakan bahwa banyak pihak yang mengklaim hotel tempatnya bekerja telah menerapkan budaya harmoni *Tri Hita Karana*, tetapi pada kenyataannya apabila ada karyawan yang tertimpa musibah atau sakit, mereka harus menanggung seluruh beban operasional dan biaya medis secara mandiri tanpa adanya kepedulian nyata dari manajemen terhadap nasib serta kesejahteraan mereka sebagai manusia (Wawancara, 18 Juli 2026).

Sebaliknya, potret kolektivisme yang kontras ditemukan pada komunitas pesisir di Nusa Penida. Di Desa Toyapakeh, Kelompok Sadar Wisata Bahari (Pokdarwis Bahari) yang beranggotakan 25 kepala keluarga berhasil mentransformasikan nilai *pawongan* ke dalam sistem ekonomi sirkular yang adil dan transparan. Berdasarkan data internal Pokdarwis per Mei 2026, mekanisme pembagian pendapatan dari aktivitas ekowisata diatur secara ketat dengan formulasi: 30% dialokasikan untuk dana umum *banjar* guna pembangunan infrastruktur desa; 40% didistribusikan langsung kepada anggota berdasarkan akumulasi hari kerja secara proporsional dan 30% sisanya disimpan sebagai dana darurat kolektif untuk program konservasi lingkungan.

Menurut Made Sutrisna selaku Kepala Pokdarwis Bahari Toyapakeh menyatakan bahwa sistem pembagian yang transparan tersebut berhasil menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) di kalangan warga, sehingga apabila terjadi kerusakan pada ekosistem terumbu karang, masyarakat lokal akan menjadi pihak pertama yang bergerak secara sukarela untuk memperbaikinya karena disadari sebagai sumber penghasilan utama yang mutlak harus dijaga sendiri dari eksploitasi pihak luar (Wawancara, 22 Mei 2026). Perbandingan empiris antara dua lokus ini memberikan bukti teoretis yang kuat mengenai operasionalisasi nilai kearifan lokal. Mekanisme distribusi pendapatan yang berbasis komunitas di Nusa Penida membuktikan bahwa nilai *pawongan* mampu beroperasi secara nyata sebagai motor penggerak jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan kohesi masyarakat di wilayah terpencil. Kondisi ideal tersebut berbanding terbalik dengan lanskap pariwisata korporat di properti mewah Seminyak, di mana konsep *pawongan* cenderung direduksi menjadi sekadar klaim retorik, estetika tekstual, dan komodifikasi nilai tanpa komitmen tulus pada kesejahteraan pekerja.

d. Transformasi *Parahyangan* Dari Sakral ke Atraksi

Parahyangan meliputi dimensi spiritual religius mengalami transformasi dramatis dari nilai sakral menjadi atraksi komersialisasi di kawasan massa, sementara tetap dipertahankan integritasnya dalam konteks ekowisata laut berkelanjutan. Pura Luhur Poten Gianyar menyesuaikan jadwal upacara agar selaras dengan puncak kunjungan

wisatawan tinggi. Menurut Pemangku Pura Ida Ketut Martayasa menyatakan bahwa sekarang acara ritual disesuaikan agar cocok dengan jam kunjungan wisatawan, padahal dulu waktu *ngejot* adalah waktu larangan total untuk bekerja, sekarang malah dijadikan atraksi tarik wisatawan (Wawancara, 10 Juni 2026).

Temuan ini menguatkan kritik Cohen (1988) tentang *commodification of authenticity* dimana elemen sakral diubah menjadi produk konsumsi. Namun di Desa Ped Nusa Penida, program restorasi karang dirancang dengan menyertakan elemen ritual: setiap peluncuran kegiatan penanaman dimulai dengan sesi melukat bersama dipimpin pemangku laut setempat. Pendekatan ini memberikan bobot moral yang kuat dan meningkatkan partisipasi aktif warga menjadi subjek pengatur bukan objek, sebaliknya di kawasan massa di mana ritus spiritual menjadi beban administratif yang dipersingkat demi efisiensi operasional.

e. Dampak Konkret Pada Konservasi dan Ekonomi Nelayan

Dimensi *parahyangan*, yang secara fundamental melingkupi hubungan spiritual religius antara manusia dengan Tuhan, mengalami transformasi dramatis dari nilai sakral menjadi komoditas atraksi di kawasan wisata massa, sementara integritasnya tetap mampu dipertahankan dalam konteks ekowisata laut berkelanjutan. Di kawasan pariwisata massal, ruang dan waktu ritual keagamaan sering kali dipaksa tunduk pada ritme industri pariwisata. Sebagai contoh, tata kelola ritual di Pura Luhur Poten Gianyar kini mulai mengalami penyesuaian jadwal upacara agar selaras dengan puncak kunjungan wisatawan.

Menurut Ida Ketut Martayasa selaku Pemangku Pura Luhur Poten Gianyar menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan acara ritual keagamaan saat ini sengaja disesuaikan agar cocok dengan jam kunjungan wisatawan, padahal secara historis tradisi *ngejot* merupakan waktu sakral yang memberlakukan larangan total untuk bekerja, namun kini justru direduksi menjadi atraksi pertunjukan untuk menarik minat wisatawan (Wawancara, 10 Juni 2026). Temuan empiris ini menguatkan kritik teoretis Cohen (1988) mengenai *commodification of authenticity*, di mana elemen yang semula sarat akan nilai sakral kebudayaan diubah sedemikian rupa menjadi produk konsumsi industri pariwisata global.

Kondisi yang bertolak belakang terjadi di Desa Ped, Nusa Penida, di mana aspek spiritual *parahyangan* tidak diposisikan sebagai tontonan, melainkan sebagai fondasi etika lingkungan. Program restorasi terumbu karang di kawasan ini sengaja dirancang dengan mengintegrasikan elemen ritual keagamaan secara substantif. Dalam implementasinya, setiap peluncuran kegiatan penanaman struktur karang selalu diawali dengan sesi upacara melukat bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini berhasil memberikan bobot moral yang kuat bagi komunitas. Proses spiritualisasi konservasi ini secara langsung meningkatkan partisipasi aktif warga, sehingga mereka menempatkan diri sebagai subjek pengatur lingkungan, bukan sekadar objek pariwisata. Pola pelestarian berbasis kesadaran religius di Nusa Penida ini menjadi antitesis dari lanskap pariwisata kawasan massa, di mana ritus spiritual sering kali dianggap sebagai beban administratif dan dipersingkat durasinya demi mengejar efisiensi operasional bisnis.

4. Adaptasi Tri Hita Karana Dalam Modernisasi Pariwisata

a. Kerangka Analitik dan Variasi Lokal

Penerapan prinsip *Tri Hita Karana* di Bali tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai bentuk harmonisasi statis antara tradisi luhur dan arus modernitas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi *Tri Hita Karana* merupakan sebuah proses negosiasi dinamis yang sangat bergantung pada kapasitas tata kelola institusi lokal (*local governance*) serta besarnya tekanan kapitalisme pasar global. Dalam konteks ini, tiga

lokus penelitian yakni kawasan wisata massa Kuta-Seminyak, desa wisata berbasis komunitas di Gianyar, dan ekowisata laut di Nusa Penida menunjukkan pola variasi implementasi yang radikal.

Perbedaan tajam ini dipengaruhi oleh bagaimana indikator operasional dari ketiga pilar *Tri Hita Karana* (*parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*) ditransformasikan ke dalam aturan nyata yang mengikat para pelaku industri pariwisata. Indikator-indikator operasional tersebut dibedah melalui dua lensa analitis utama, yaitu modal spiritual (*spiritual capital*) dan kompas etis (*ethical compass*). *Spiritual capital* diukur secara kuantitatif maupun kualitatif melalui integritas pelaksanaan ritual keagamaan serta transparansi alokasi dana operasional untuk pemeliharaan pura.

Sementara itu, *ethical compass* dievaluasi secara konkret melalui efektivitas mekanisme distribusi manfaat ekonomi bagi kedaulatan warga lokal serta komitmen nyata dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian empiris ini mengungkapkan sebuah antitesis mendasar: ketika *Tri Hita Karana* dijadikan sebagai alat strategis oleh komunitas yang memiliki kekuatan institusi adat yang kuat, filosofi ini mampu menciptakan ketahanan ekonomi ekologis (*socioecological resilience*) yang tangguh menghadapi krisis.

Sebaliknya, ketika nilai-nilai *Tri Hita Karana* hanya dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi pemasaran semata tanpa adanya pengarusutamaan (*mainstreaming*) ke dalam sistem administratif industri, konsep adiluhung ini berisiko tinggi direduksi menjadi sekadar komoditas simbolis dan kosmetik visual (*cultural washing*). Dengan demikian, keberhasilan penyerapan *Tri Hita Karana* dalam arus modernisasi pariwisata tidak lagi bertumpu pada keindahan filosofinya semata, melainkan pada kapasitas dan keberanian para aktor lokal untuk menerjemahkan norma adat menjadi instrumen manajerial yang terintegrasi secara sistematis di setiap lokus kebijakan.

b. Reduksi Simbolik di Kawasan Massa

Di kawasan wisata massa Kuta-Seminyak, pola negosiasi *Tri Hita Karana* cenderung mengarah pada reduksi simbolik dimana nilai-nilai spiritual dan sosial dikalahkan oleh efisiensi komersial jangka pendek. Hal ini terbukti melalui observasi mendalam terhadap 15 unit usaha hotel bintang empat hingga lima selama periode Juni-Juli 2026 yang menemukan bahwa meski 93% sampel menyebutkan kata *Tri Hita Karana* dalam visi misi mereka, hanya 7% yang menunjukkan bukti nyata penerapan prinsip tersebut dalam operasional harian seperti program limbah cair terintegrasi atau audit jejak karbon rutin.

Temuan ini diperkuat oleh data lingkungan yang mencatat rata-rata 15 kg sampah plastik per hari dikumpulkan sepanjang 2 km garis pantai Seminyak tanpa intervensi konsisten dari sektor swasta. Disonansi lebih terasa pada dimensi *pawongan* dimana survei kepuasan karyawan N=45 pekerja *hospitality* tercatat bahwa 68% responden menerima upah setara UMK regional tanpa akses ke jaminan kesehatan atau pelatihan keterampilan lanjutan, bertentangan dengan semangat gotong royong ajaran *Tri Hita Karana*, sehingga menegaskan bahwa di konteks modal industri tinggi, *Tri Hita Karana* berfungsi sebagai perangkat legitimasi kapitalis bukan etika komunal yang mengatur relasi sosial.

c. Negosiasi Substantif di Desa Wisata Gianyar

Berlawanan dengan dinamika yang terjadi di kawasan wisata massa Seminyak, tata kelola pariwisata di beberapa desa wisata di Kabupaten Gianyar khususnya Kelusa, Tampaksiring, dan Keliki menunjukkan keberhasilan penyerapan nilai *Tri Hita Karana* melalui proses negosiasi ulang yang berbasis pada penguatan institusi adat. Di ketiga wilayah ini, filosofi *Tri Hita Karana* berhasil ditransformasikan dari sekadar konsep abstrak menjadi kerangka operasional yang konkret melalui penyusunan *pararem*.

Dokumen hukum adat ini berfungsi sebagai konstitusi mikro yang secara mengikat mengatur seluruh hak dan kewajiban anggota desa pakraman, terutama dalam mekanisme pembagian pendapatan, pemanfaatan fasilitas publik, hingga pengawasan berkelanjutan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam implementasi praktisnya, dimensi *pawongan* memegang peranan sentral sebagai motor penggerak keadilan distributif ekonomi lokal. Kelompok adat, *sekeha teruna-truni* (organisasi pemuda), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dilibatkan secara sistematis dalam menerima proporsi pendapatan pariwisata secara adil dan proporsional. Distribusi manfaat yang inklusif ini berhasil menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang kuat di kalangan krama desa. Dampak positif dari penguatan relasi sosial ini tercermin dari penurunan angka konflik internal masyarakat hingga mencapai sekitar 40% jika dibandingkan dengan periode pra-pandemi, mengacu pada basis data pembangunan Kabupaten Gianyar.

Selain penguatan pilar sosial, integrasi pilar *parahyangan* di ketiga desa wisata ini diwujudkan melalui kebijakan tegas penutupan total akses pura bagi aktivitas wisata selama pelaksanaan upacara besar (*piodalan*). Regulasi adat ini terbukti efektif dalam memproteksi kesucian ruang sakral ritual tanpa harus mengganggu arus kunjungan wisatawan secara permanen pada hari-hari biasa. Sementara itu, pilar *palemahan* diimplementasikan secara nyata melalui pengoperasian sistem Tempat *Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) di tingkat desa serta pemberlakuan pembatasan kapasitas kunjungan harian (*carrying capacity*) yang disepakati bersama dalam musyawarah adat.

Keberhasilan model tata kelola berbasis komunitas ini didukung secara akseleratif oleh pola kolaborasi pentahelix yang menyinergikan peran pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan sektor swasta, khususnya dalam menyuplai bantuan pendanaan serta asistensi teknis manajerial. Kendati demikian, tantangan struktural tetap membayangi keberlanjutan model ini. Di beberapa desa wisata, sisa-sisa pola manajemen yang bersifat *top-down* masih ditemukan dan berpotensi memarginalisasi peran komunitas lokal apabila mekanisme partisipasi publik yang demokratis tidak dipertahankan secara konsisten dan berkelanjutan ke depan.

d. Integrasi Holistik di Ekowisata Laut Nusa Penida

Sementara itu, di kawasan ekowisata laut Nusa Penida khususnya Desa Ped, Toyapakeh, dan Kelingking, *Tri Hita Karana* muncul sebagai kerangka normatif potensial yang sukses menjembatani tujuan konservasi dan pemberdayaan pesisir dengan mengintegrasikan ritual spiritual langsung ke dalam aksi ekologis. Bukti tertinggi dari *approach* ini terlihat pada program restorasi terumbu karang yang dimulai dengan sesi melukat dipimpin pemangku laut setempat untuk melegitimasi keterkaitan menjaga laut dengan kewajiban suci.

Hasil empiris longitudinal terhadap 60 keluarga nelayan Juni 2025 versus Juni 2026 mencatat peningkatan pendapatan bulanan sebesar 38,6% disertai peningkatan tutupan karang zona konservasi Toyapakeh sebesar 18% dalam kurun 12 bulan akibat peraturan zonasi larangan penangkapan ikan selebar 3 hektar selama enam bulan per tahun. Mekanisme pembagian pendapatan melalui Pokdarwis Bahari dengan skema 30% dana umum, 40% bagi hasil, dan 30% cadangan konservasi menyebabkan tingkat partisipasi warga naik drastis dari 22% menjadi 78%, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Pokdarwis Made Sutrisna bahwa kerusakan terumbu akan segera diperbaiki karena itulah sumber penghasilan mereka sendiri. Perbedaan kontras ini membuktikan bahwa integrasi ketiga pilar *Tri Hita Karana* secara holistik mampu menciptakan siklus positif di mana *stewardship* lingkungan justru meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan, berbeda sama sekali dengan fragmentasi sistematis di koridor wisata massa.

e. Sintesis dan Rekomendasi Kebijakan

Secara sintesis, temuan dari ketiga lokus ini menegaskan bahwa potensi transformasi *Tri Hita Karana* tergantung pada kekuatan tata kelola lokal, kapasitas komunitas mengelola sumber daya, dan tekanan ekonomi pasar yang bervariasi drastis antar konteks, namun perlu dibatasi klaim bahwa *Tri Hita Karana* merupakan solusi universal tanpa syarat. Kegagalan di Seminyak menunjukkan bahwa tanpa payung kelembagaan lokal kuat dan insentif ekonomi jelas, nilai-nilai *Tri Hita Karana* rentan direduksi menjadi komoditas visual, sementara keberhasilan di Gianyar dan Nusa Penida menekankan pentingnya formalisasi norma adat ke dalam instrumen manajerial yang terukur.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan masa depan harus mengakomodasi kebutuhan spesifik tiap tipe destinasi di mana kawasan massa memerlukan sertifikasi wajib minimum indikator *Tri Hita Karana* seperti alokasi 5% omzet ke pelestarian lokal, desa wisata memerlukan formalisasi *pararem* ke Peraturan Bupati, dan ekowisata laut membutuhkan forum multi-pihak koheren untuk pendanaan teknis komunitas. Hindari sikap normatif yang menjanjikan harmoni ideal, fokuslah pada proses negosiasi praktis di mana *Tri Hita Karana* berfungsi sebagai agen adaptif bila didampingi oleh transparansi akuntabilitas, kapasitas administrasi desa, dan mekanisme pemantauan independen agar filosofi komunal *Balinese* tidak mati sebagai simbol hidup, melainkan tumbuh sebagai fondasi regeneratif pariwisata berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Implementasi prinsip *Tri Hita Karana* dalam pariwisata Bali bersifat sangat kontekstual, bukan nilai statis dengan penerapan seragam, melainkan kerangka negosiasi dinamis antara norma budaya lokal dan tekanan pasar. Temuan di tiga lokus menunjukkan variasi pola yang signifikan: di kawasan wisata massa Kuta-Seminyak, *Tri Hita Karana* cenderung direduksi menjadi simbol branding tanpa integrasi substantif ke dalam kebijakan operasional sebaliknya, di desa wisata Gianyar, *Tri Hita Karana* berfungsi sebagai pilar tata kelola berbasis institusi adat yang mengikat distribusi manfaat dan pelestarian lingkungan; sementara di ekowisata laut Nusa Penida, *Tri Hita Karana* mengintegrasikan aspek spiritual, solidaritas sosial, dan konservasi ekosistem secara holistik sehingga menghasilkan dampak nyata terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Perbedaan pola tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *Tri Hita Karana* tidak hanya bergantung pada ketersediaan nilai filosofis, tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan kelembagaan lokal, otonomi komunitas dalam mengelola sumber daya, serta insentif kebijakan yang mendukung. Tanpa struktur tata kelola yang koheren, *Tri Hita Karana* berisiko tetap terperangkap sebagai retorika marketing terutama di kawasan dimana kepentingan komersial dominan dan partisipasi masyarakat terpinggirkan. Oleh karena itu, kunci transformasi terletak pada kemampuan menerjemahkan prinsip normatif menjadi instrumen manajerial yang dapat dipantau, diaudit, dan dikenakan sanksi ketika dilanggar.

Daftar Pustaka

- Adpebi, O. O., Oni, O. S., & Okoruwa, A. O. (2024). Eco-Spiritual Tourism In Nigeria: Exploring Alternative Pathways For Sustainable Tourism In The Post-Pandemic Era. *Journal of Sustainability Science and Management*, 19(8), 245-262.
- Ahzan, A., Pratama, R., Firmansyah, L., & Hakim, F. L. (2024). Local Wisdom Based Sustainable Tourism Development In Indonesia: A Systematic Literature Review. *Platensis: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 11(1), 52-68.

- Bandema, I. (2022). *Filsafat Pendidikan Bali: Tinjauan Historis-Konseptual*. Denpasar: Yayasan Penerbit Udarma.
- Cohen, E. (1988). Authenticity And Commoditization In Tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371-386.
- Dewi, A. A. S. L., & Wibisana, A. A. N. A. (2023). *Tri Hita Karana As A Concept Of Local Wisdom In The Development Of Sustainable Tourism Industry In Bali. Dalam Proceedings of the International Conference on Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism*. Dordrecht: Atlantis Press.
- Hanafi, M. A., Saputra, I. G. B. N., & Adi, I. K. (2024). Implementasi Nilai Tri Hita Karana Dalam Pengelolaan Kawasan Pura Sebagai Pusat Pariwisata Spiritual di Bali. *Jurnal Pariwisata Budaya*, 8(2), 112-128.
- Hanita, M., Bangso, F. D., & Aprian, M. (2024). Beyond Attraction: Unveiling Bali's Cultural Community's Role In Bolstering Tourism Resilience Amidst The COVID-19 Pandemic. *Journal of Destination Marketing & Management*, 34, 100953.
- Koerniawan, D., & Santoso, B. U. (2023). Tour Guides' Perception Toward Local Culture: Case Study Of Ubud Traditional Market, Bali. *Prosiding Seminar Nasional Pariwisata*, 6(1), 1-14.
- Lemus, C. (2025). The Commodification Of Authenticity In Luxury Resort Branding: A Critical Analysis Of Tri Hita Karana in Bali's Hospitality Sector. *International Journal of Tourism Anthropology*, 5(2), 89-107.
- Lanus, S. (2025). Critique Of Empty Rebranding In Bali Tourism: When Local Wisdom Becomes Marketing Gimmick. *Bali Development Review*, 4(1), 33-51.
- Manuari, I. A. R., Kumalasari, P. D., Devi, N. L. N. S., Rastamiari, I. G. A. E. P., & Hananingrum, N. L. P. G. (2024). Peran Tri Hita Karana Dan Modal Intelektual Hijau Dalam Akuntansi Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(3), 504-518.
- Pitana, I. (2010). *Tri Hita Karana-The Local Wisdom Of The Balinese In Managing Development*. Berlin: Springer.
- Prihadi, D. J., Shalahuddin, M. R., Novianti, E., Junirahma, N. S., Pamungkas, W., Dhahiyat, A. P., Annida, S. B., & Lahbar, G. M. (2024). The 'Tri Hita Karana' ecotourism Approach For Sustainable Marine Resource Management And Tourism In Bali. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 9(4), 858-869.
- Setiadi, P., Sukaca, I. W., & Wardhana, I. G. B. (2014). Tri Hita Karana Philosophy In Developing Sustainable Tourism In Bali. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(3), 175-183.
- Sukma, A. H. (2023). Tri Hita Karana as a Bali Tourism Communication Strategy in Preserving Tourism Cultural Destinations. *Review of Politics and Public Policy in Emerging Economies*, 5(1), 45-56.
- Tepijon, M. (2021). Strategi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Bali. *Jurnal Pengembangan Pariwisata*, 9(2), 78-89.
- Triyana, K., Permadi, W. A., & Artawa, K. (2024). Implementation of Tri Hita Karana Concept In Sustainable Tourism Development: A Case Study Of Balinese Villages. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 23-38.
- Widiastini, N. M. A., Arsa, I. K. S., Adinata, K. R. W., & Suryanto, I. G. B. (2023). Harmonization of Tri Hita Karana Local Value In Tourism Development In Sidetapa Village. *International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences*, 3(3), 22-30.

- Widhiartha, I. M. (2023). Dampak Pariwisata Massal Terhadap Degradasi Terumbu Karang di Perairan Bali. *Jurnal Kelautan*, 18(2), 115-128.
- Widhiastuti, N. K., Kartika, N. P., & Putra, I. W. A. (2024). Religious Values Integration In Increasing Tourist Compliance At Balinese Temples. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 14(1), 55-68.
- Wiryan, I. W., & Ernawati, N. (2024). Tri Hita Karana In The Spatial Planning Of Bali Province In National And Regional Regulations As An Environmental Conservation Effort. *International Journal of Environmental Impacts*, 7(1), 31-40.
- Yuhan, W., & Widiastini, N. M. A. (2026). Tri Hita Karana: A Holistic Framework For Sustainable Tourism Development In Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 7(1), 1-12.
- Zubaedah, S., & Rahman, A. (2023). Spatial Transformation And Social Impact Of Digital Nomad Communities In Canggu and Ubud, Bali. *Indonesian Journal of Geography*, 55(2), 201-218.